

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Semester II Tahun 2023 -AUDITED



Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
097577**

Untuk Periode yang Berakhir Semester II Tahun 2023

**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057

Lebak - Banten 42314

e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

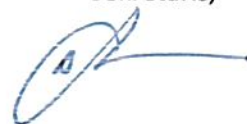
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebak, 04 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung	21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	22
A.3. Basis Akuntansi	22
A.4. Dasar Pengukuran	22
A.5. Kebijakan Akuntansi	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	31
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	Error! Bookmark not defined.
C.1.2 Persediaan	35
C.1.3 Piutang Bukan Pajak	Error! Bookmark not defined.
C.2.1 Tanah	35
C.2.2 Peralatan dan Mesin	37
C.2.3 Gedung dan Bangunan	37
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	38
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	38
C.2.6 Akumulasi Penyusutan	39

C.2.7 Aset Lainnya	39
C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	40
C.3.2 Utang yang belum ditagihkan	Error! Bookmark not defined.
C.3.3 Uang Muka dari KPPN	40
C.4.1. Ekuitas	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	41
D.2. Beban Pegawai	41
D.3. Beban Persediaan	42
D.4. Beban Barang dan Jasa	42
D.5. Beban Pemeliharaan	43
D.6. Beban Perjalanan Dinas	43
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
D.8. Kegiatan Non Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (defisit) LO	44
E.3. Koreksi Nilai Persediaan	44
E.4. Transaksi Antar Entitas	44
E.5. Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	45
F.2. Pengungkapan Lain-lain	45



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Lebak - Banten 42314

Telp. 0252201057 Fax. 0252201057 e-mail : info@pn-rangkasbitung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebak, 04 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 22.001.212,- atau mencapai 156,98% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 14.015.000,-.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.123.573.390,- atau mencapai 92,24% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.470.720.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Per 30 September 2023 dicatat dan disajikan Aset sebesar Rp. 25.840.798.992,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3.256.000,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 5.506.853.057,-) sebesar Rp. 25.326.238.879,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya dengan rincian aset lain-lain Rp. 304.672.275,- (akumulasi penyusutan Rp. 304.672.275,-) dengan total nilai aset lainnya Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 5.780.958,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 5.780.958,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 25.323.713.921,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 11.314.612,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.714.295.251,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 4.702.980.639,-). Pendapatan Kegiatan Non Operasional Rp. 12.319.600 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0, Beban Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 12.319.600. sehingga mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp. 4.690.661.039,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 26.098.553.743,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp. 4.690.661.039,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 207.003.211. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.122.824.428,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 25.323.713.921,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Desember 2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A Pendapatan Negara dan Hibah	A				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1	14.015.000	22.001.212	156,98	16.804.000
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		14.015.000	22.001.212	156,98	16.804.000
B Belanja Negara	B				
1. Belanja Pegawai	B.1	3.035.381.000	2.724.664.821	89,76	3.493.168.973
2. Belanja Barang	B.2	1.435.339.000	1.398.908.569	97,46	1.619.831.922
3. Belanja Modal	B.3	0	0	0,00	240.517.000
Jumlah Belanja Negara		4.470.720.000	4.123.573.390	92,24	5.353.517.895

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	C		
Aset Lancar	C.1		
Persediaan	C.1.1	3.256.000	2.703.500
Jumlah Aset Lancar		3.256.000	2.703.500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	17.829.911.000	17.829.911.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.572.926.796	3.548.761.796
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.413.297.000	9.388.641.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	24.656.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	16.957.140	16.957.140
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(5.506.853.057)	(4.709.258.328)
Jumlah Aset Tetap		25.326.238.879	26.099.668.608
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-lain	C.3.1	304.672.275	304.672.275
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(304.672.275)	(304.672.275)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		25.329.494.879	26.102.372.108
KEWAJIBAN	D		
Kewajiban Jangka Pendek	D.1		
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.1.1	3.875.791	280.198
Pendapatan Diterima Dimuka	D.1.2	1.905.167	3.538.167
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.780.958	3.818.365
Jumlah Kewajiban		5.780.958	3.818.365
EKUITAS	E		
Ekuitas	E.1	25.323.713.921	26.098.553.743
Jumlah Ekuitas		25.323.713.921	26.098.553.743
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		25.329.494.879	26.102.372.108

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	2022
Kegiatan Operasional	F		
Pendapatan	F.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.1.1	11.314.612	13.265.833
Jumlah Pendapatan		11.314.612	13.265.833
Beban	F.2		
Beban Pegawai	F.2.1	2.727.730.812	3.492.408.773
Beban Persediaan	F.2.2	55.717.000	62.756.450
Beban Barang dan Jasa	F.2.3	703.939.253	854.407.456
Beban Pemeliharaan	F.2.4	576.529.418	637.314.658
Beban Perjalanan Dinas	F.2.5	62.700.000	59.381.429
Beban Penyusutan dan Amortisasi	F.2.6	587.678.768	627.717.668
Jumlah Beban		4.714.295.251	5.733.986.434
(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.702.980.639)	(5.720.720.601)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.319.600	(279.000)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	279.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		12.319.000	(279.000)
Pos Luar Biasa			0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(4.690.661.039)	(5.720.999.601)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2023	2022
Ekuitas Awal	G.1	26.098.553.743	25.768.337.449
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	G.2	(4.690.661.039)	(5.720.999.601)
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	G.3	(207.003.211)	278.500
Penyesuaian Nilai Aset	G.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	G.4.1	0	278.500
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.4.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.5	(207.003.211)	0
Lain-Lain	G.6	0	0
Transaksi Antar Entitas	G.7	4.122.824.428	6.050.937.395
Kenaikan/penurunan ekuitas	G.8	(774.839.822)	330.216.294
Ekuitas Akhir		25.323.713.921	26.098.553.743

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Rangkasbitung terletak di Jalan RA. Kartini No. 55 Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG YANG AGUNG" Visi sendiri memiliki pengertian suatu pernyataan mengenai tujuan dari organisasi yang disampaikan atau diekspresikan melalui pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang didapatkan juga aspirasi dan cita-cita dimasa yang akan datang.

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian Perkara
2. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penyisihan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuranyang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan as yang dibatasi penggunaannya.KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rancangan Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.
22.001.212

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 22.001.212,- atau mencapai 156,98% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 14.015.000,-. Pendapatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP (Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.015.000	9.681.612	69,08
2.	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.319.600	0,00
Total Pendapatan		14.015.000	22.001.212	156,98

Realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,62% dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 dikarenakan pengurangan jumlah hakim;
- Pendapatan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode 31 desember 2022 dikarenakan adanya pengembalian gaji juli 2022 a.n Yudi Rozadinata, S.H. yang diberhentikan sementara dalam jabatannya. Dan adanya pengembalian uang makan bulan desember 2022 untuk 3 pegawai.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember	31 Desember	%
		2023	2022	
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.681.612	16.804.000	(73,57)
2.	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.319.600	0	0,00
Total Pendapatan		22.001.212	16.804.000	23,62

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja: Rp.
4.123.573.390

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.123.573.390,- atau sebesar 92,24% dari anggaran senilai Rp. 4.470.720.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 September 2023 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.035.381.000	2.724.664.821	89,76
Belanja Barang	1.435.339.000	1.398.908.569	97,46
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	4.470.720.000	4.123.573.390	92,24
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	4.470.720.000	4.123.573.390	92,24

Kondisi realisasi belanja periode Semester II Tahun 2023 atau per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Semester II Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan dikarenakan jumlah hakim dan pegawai berkurang dibanding dengan tahun sebelumnya.
2. Belanja barang periode Semester II tahun 2023 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan Semester II Tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 tidak terealisasi anggaran sewa rumah dinas hakim.
3. Belanja Modal mengalami penurunan realisasi pada Semester II Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Semester II Tahun 2022 dikarenakan untuk anggaran tahun 2023 tidak tersedia belanja modal dalam DIPA.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Belanja Pegawai	2.724.664.821	3.504.711.885	(28,63)
Belanja Barang	1.398.908.569	1.619.831.922	(15,79)
Belanja Modal	0	240.517.000	(100,00)
Total Belanja Bruto	4.123.573.390	5.365.060.807	(30,11)
Pengembalian Belanja	0	11.542.912	
Total Belanja	4.123.573.390	5.353.517.895	(29,83)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai: Rp.
2.724.664.821

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.724.664.821,- dan Rp. 3.504.711.885. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (28,63%) dari tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya beberapa pegawai dan hakim yang mendapatkan promosi dan mutasi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 30 September 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik - (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.357.520.980	1.617.724.630	(260.203.650)	(19,17)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.099	23.696	(2.597)	(12,31)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	83.386.676	110.206.833	(26.820.157)	(32,16)
Belanja Tunj. Anak PNS	31.360.986	36.685.082	(5.324.096)	(16,98)
Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	833.150.000	1.233.550.000	(400.400.000)	(48,06)
Belanja Tunj. PPh PNS	87.333.760	128.143.944	(40.810.184)	(46,73)
Belanja Tunj. Beras PNS	79.372.320	93.059.700	(13.687.380)	(17,24)
Belanja Uang Makan PNS	206.569.000	242.673.000	(36.104.000)	(17,48)
Belanja Tunjangan Umum PNS	17.810.000	14.505.000	3.305.000	18,56
Total Belanja Brutto	2.724.664.821	3.504.711.885	(780.047.064)	(28,63)
Pengembalian Belanja	0	11.542.912	(11.542.912)	(100,00)
Total Belanja Netto	2.724.664.821	3.493.168.973	(768.504.152)	(28,21)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.398.908.569

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.398.908.569 dan Rp. 1.619.831.922. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (15,79%) dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (%)
Belanja Barang Operasional	688.972.739	652.926.174	5,23
Belanja Barang Non Operasional	7.304.000	8.591.216	(17,62)
Belanja Jasa	7.132.912	199.000.245	(2689,89)
Belanja Pemeliharaan	543.040.918	608.737.658	(12,10)
Belanja Perjalanan Dinas	62.700.000	59.381.429	5,29
Belanja Barang Persediaan	89.758.000	91.195.200	(1,60)
Total Belanja Brutto	1.398.908.569	1.619.831.922	(15,79)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	1.398.908.569	1.619.831.922	(15,79)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal: Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Rangkasbitung 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 240.517.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (100,00%) dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak memiliki anggaran Belanja Modal pada DIPA Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	159.767.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	80.750.000	(100,00)
Total Belanja Brutto	0	240.517.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	240.517.000	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Persediaan: Rp.
3.256.000

C.1.1 Persediaan

Persediaan Per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.256.000,- dan Rp. 2.703.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(RP)	(RP)
Barang Konsumsi	1.785.500	2.648.000
Barang untuk Pemeliharaan	1.470.500	55.500
Total	3.256.000	2.703.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Fisik Semester II Tahun 2023 No. 75/SEK.W29.U3/PL1.2.7/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024.

C.2. Aset Tetap

Tanah :Rp.
17.829.911.000

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung Per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.829.911.000 dan Rp. 17.829.911.000. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	396	Hak Milik No.18	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Ketua PN Rangkasbitung	Rp. 614.180.000
2.	2	296	Hak Pakai No.1	Pemerintah Republik Indonesia Cq	Rumah Dinas Wakil Ketua PN	Rp.443.183.000

				Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rangkasbitung	
3.	3	255	Hak Pakai No.6	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Panitera PN Rangkasbitung	Rp.390.392.000
4.	4	352	Hak Pakai No.23	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Hakim PN Rangkasbitung	Rp.536.807.000
5.	5	600	Hak Pakai No.4	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Dinas Hakim PN Rangkasbitung	Rp.915.012.000
6.	1	1.330	Hak Pakai No.2	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Digunakan sendiri bangunan/kantor Pemerintah	Rp. 3.982.353.000
7.	2	3.280	Hak Pakai No.15	Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia	Digunakan sendiri bangunan/kantor Pemerintah	Rp. 10.947.984.000
Jumlah						17.829.911.000

Peralatan dan
Mesin Rp.
3.572.926.796

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 3.572.926.796 dan Rp. 3.548.761.796. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	3.548.761.796
Transfer masuk	24.165.000
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 September 2023	3.572.926.796

pada Tahun 2023 terdapat transfer masuk berupa 1(satu) unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 132/BUA.7/BAST/BMN-SS/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan nilai Rp. 19.850.000,- dan 1(satu) set CCTV sesuai berita acara serah terima/transfer Nomor 241/DJU1/SK/PL.07/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Gedung dan
Bangunan Rp.
9.413.297.000

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.413.297.000,- dan Rp. 9.388.641.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	9.388.641.000
Mutasi Tambah	24.656.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	9.413.297.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku 30 September 2023	9.413.297.000

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.413.297.000,-. Mutasi tambah Jalan, irigasi dan Jaringan dipindahkan masuk ke aset Gedung dan bangunan senilai Rp. 24.656.000,-.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 0

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 24.656.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	24.656.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	24.656.000
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0. berdasarkan Berita Acara inventarisasi barang milik negara dan tindak lanjut temuan BPK 2022 Mahkamah Agung RI Nomor W29.U3/1908/SEK.3/KKA/IX/2023 tanggal 26 September 2023 adanya koreksi pencatatan dan koreksi nilai.

Aset Tetap
Lainnya: Rp.
16.957.140,-

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.957.140 dan Rp. 16.957.140.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	16.957.140
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	16.957.140
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	16.957.140

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 16.957.140. Mutasi tambah sebesar Rp.0 dan Mutasi Kurang sebesar Rp.0.

Akumulasi
Penyusutan:
[Rp.
5.506.853.057]

C.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp. 5.506.853.057) dan (Rp. 4.709.258.328).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Gedung Bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	3.572.926.796	(3.037.951.573)
2	Gedung dan Bangunan	9.413.297.000	(2.468.901.484)
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	16.957.140	0
5	Tanah	17.829.911.000	0
Jumlah			(5.506.853.057)

Aset Lainnya :
Rp. 0

C.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset lainnya merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp. 304.672.275 dan Rp. 304.672.275. Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset Lainnya diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam Aset Lainnya. Aset Lainnya terdiri dari Aset Lain-lain sebesar Rp. 304.672.275 dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar (Rp. 304.672.275) sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0.

Utang kepada
Pihak Ketiga :
Rp. 3.875.791,-

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.875.791,- dan Rp. 280.198. utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban bendahara untuk melakukan pembayaran hak kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Utang kepada pihak ketiga pada periode 31 Desember 2023 terdiri dari Beban belanja pegawai yang masih harus dibayar yaitu pembayaran kekurangan Gaji Induk bulan November s.d Desember 2023 untuk 1 pegawai dan belanja barang yang masih harus dibayar yaitu langganan daya dan jasa seperti air, telepon, dan pengiriman surat dinas pos pusat.

Pendapatan
diterima dimuka:
Rp. 1.905.167

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.905.167 dan Rp. 3.538.167. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pembayaran sewa kantin pada pengadilan negeri rangkasbitung untuk periode tahun 2023.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
25.323.713.921

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.323.713.921 dan Rp. 26.098.553.743. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.
11.314.612

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 11.314.612,- dan Rp. 13.265.833,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.314.612	13.265.833	(14,71)
Total Pendapatan	11.314.612	13.265.833	(14,71)

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan terdiri dari pendapatan sewa rumah dinas yang dipotong melalui SPM Gaji Induk.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.
2.727.730.812

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.727.730.812,- dan Rp. 3.492.408.773,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Gaji Pokok PNS	1.360.181.680
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.187
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	83.652.746
Beban Tunj. Anak PNS	31.467.414
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	833.150.000
Beban Tunj. PPh PNS	87.366.465
Beban Tunj. Beras PNS	79.372.320
Beban Uang Makan PNS	206.569.000
Beban Tunjangan Umum PNS	17.810.000
Total Beban Pegawai	2.727.730.812

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp.
55.717.000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 55,717.000,- dan Rp. 62.756.450,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.717.000	62.756.450	(11,22)
Total Beban Persediaan	55.717.000	62.756.450	(11,22)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa : Rp.
703.939.253

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 703.939.253,- dan Rp. 854.407.456,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Keperluan Perkantoran	590.650.739
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.456.500
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.932.000
Beban Barang Operasional Lainnya	14.537.500
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.704.000
Beban Langganan Telepon	1.068.148
Beban Langganan Air	3.025.166
Beban Sewa	1.465.200
Beban Jasa Lainnya	1.500.000
Total Beban barang dan jasa	703.939.253

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.576.529.418

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 576.529.418,- dan Rp. 637.314.658,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	319.934.660
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	68.805.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.301.258
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	33.488.500
Total Beban Pemeliharaan	576.529.418

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
62.700.000

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.700.000,- dan Rp. 59.381.429,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh perjalan dinas dalam rangka pelatihan atau sosialisasi serta rapat pimpinan. Rincian Beban Perjalanan untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2023 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Perjalanan Biasa	61.200.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000
Total Beban Perjalanan Dinas	62.700.000

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
587.678.768,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 587.678.768,- dan Rp. 627.717.668,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember TA 2023 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	228.906.691
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	358.772.077
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	587.678.768

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional : Rp.
12.319.600

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember TA 2023 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	12.319.600
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus (deficit) Kegiatan Non Operasional	12.319.000

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal: Rp.
26.098.553.743,-

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.098.553.743,- dan Rp. 25.768.337.449,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit)
LO : (Rp.
4.690.661.039,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp. 4.690.661.039,-) dan (Rp. 5.720.999.601,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Aset non
Revaluasi (Rp.
207.003.211,-)

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 207.003.211,-) dan Rp. 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas: Rp.
4.122.824.428,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.122.824.428,- dan Rp. 6.050.937.395,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-
Rp. masing sebesar Rp. 25.323.713.921,- dan Rp. 26.098.553.743,-
25.323.713.921,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Dari Tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Dokumen Sumber
1.	Belanja Langganan Telepon	Rp. 78.634	Kuitansi
2.	Belanja Langganan Air	Rp. 127.166	Kuitansi
3.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp. 604.000	Kuitansi
4.	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp. 2.660.700	SPM Kekurangan Gaji
5.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 88	SPM Kekurangan Gaji
6.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp. 266.070	SPM Kekurangan Gaji
7.	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp. 106.428	SPM Kekurangan Gaji
8.	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp. 32.705	SPM Kekurangan Gaji
9.	Pendapatan Sewa Kantin	Rp. 1.905.167	Bukti Setor Sewa

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah:

1. BRI Cab. Rangkasbitung virtual account 653240975771000 a.n. BPG: 161 PN RKBT (097577) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi DIPA Ke 01 Tanggal 07 Februari 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan I
2. Revisi DIPA Ke 02 Tanggal 10 April 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan II
3. Revisi DIPA Ke 03 Tanggal 13 Juli 2023 Revisi Administrasi tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4. Revisi DIPA Ke 04 Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Updating Halaman III DIPA Rencana Penarikan Dana Triwulan IV
5. Revisi DIPA Ke 05 Tanggal 27 November 2023 tentang Revisi Pagu Anggaran oleh Eselon 1

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- ✓ Tidak ada kegiatan Ralat SPM, SSBP dan SSPB pada periode Semester II Tahun 2023

LAPORAN PENDUKUNG

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (097577) Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Kode dan Nama UAPPAW : (29.03) Pengadilan Tinggi Banten

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/197/45/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak

	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√	Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya/Tidak
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
				Ya

2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

MACHMUD KHUSAERI, S.H.
NIP. 199002162009121001

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Penelaah,

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2900	Banten	097577	PN Rangkasbitung	2023	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 35.357	Kuitansi	Tagihan Pemakaian Telepon Desember 2023
					522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 43.277	Kuitansi	Tagihan Pemakaian Telepon Desember 2023
					522113	Belanja langganan Air	Rp 50.833	Kuitansi	Tagihan Pemakaian Air Desember 2023
					522113	Belanja langganan Air	Rp 76.333	Kuitansi	Tagihan Pemakaian Air Desember 2023
					521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 604.000	Kuitansi	Tagihan Surat Dinas Desember 2023

Rangkasbitung, 17 Januari 2024

Sekretaris



Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

**KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Saker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Uraian	Nilai Sewa (Harga Sewa + Pajak)	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa		Pendapatan Diterima Di Muka
						s.d 31 Desember 2023	Tahun Berjalan	
1.	Sewa gedung dan bangunan untuk Kantin	Rp 4.899.000	36 bulan	01 Maret 2022	25/02/2025	Rp 2.993.833	Rp 1.905.167	Rp 2.993.833
	Jumlah							Rp 2.993.833

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002


**RINCIAN NILAI KAS LAINNYA SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket	
					Tunai	Saldo Bank	Total		
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	-	Rp -	

Rangkasbitung, 17 Januari 2024

Sekretaris


Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

**RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket		
					Tunai	Kuitansi Belum UP	Saldo Bank		Saldo	Total
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	BRI Cab Rangkasbitung / 653240975771000	Rp -	Rp -	-

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
 Sekretaris


 Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENERIMA
PER 31 DESEMBER 2023

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2023			Ket	
					Tunai	Saldo Bank			
					Saldo	Bank dan No Rek	Total		
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp -	Rp -	-	Rp -	Tidak memiliki rekening

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
 Sekretaris



Darsono. S.H.
 NIP. 196607091989031002

**DAFTAR PENUTUPAN REKENING
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
NIHIL							

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

**DAFTAR REKENING BANK
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	BRI Rangkasbitung	BPG 161 PN RKBT 097577	653240975771000

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono. S.H.

NIP. 196607091989031002

**DAFTAR PENERIMAAN HIBAH UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
NIHIL							

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
 Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 No Dokumen : 00006
 Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Langgan Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	604.000	-
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	604.000

Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran

Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator

Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementrian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
No Dokumen : 00005
Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Langganan Air

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
√	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	76.333	-
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	76.333


Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator



Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
No Dokumen : 00004
Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Langgan Air

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
√	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	50.833	-
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	50.833


Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator



Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
 Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 No Dokumen : 00003
 Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Langganan Telepon 0252 201057

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/>	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/>	Transfer Masuk
<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/>	Transfer Keluar
<input type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/>	Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/>	Koreksi
<input type="checkbox"/>	Persediaan	<input type="checkbox"/>	

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon		
				43.277	-
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	43.277

Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator



Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

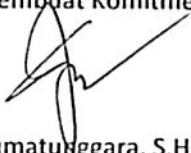
Kementrian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
No Dokumen : 00002
Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Langgan telepon 0252 201671

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
√	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon		
				35.357	-
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	35.357

Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator



Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementrian Negara/Lem : Mahkamah Agung RI
 Eselon I : Badan Urusan Adminstrasi
 Wilayah : Pengadilan Tinggi Banten
 Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 No Dokumen : 00001
 Tanggal Dokumen : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Pendapatan Sewa Diterima Di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

√	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
				1.905.167	-
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka	-	1.905.167


Dibuat oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



Cecep Sumatunggara, S.H.
NIP. 197212131993031001

Tanggal : 17 Januari 2024

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

Tanggal : 17 Januari 2024

Direkam oleh:
Operator



Machmud Khusaeri, S.H.
NIP. 199002162009121001

Tanggal : 17 Januari 2024

**DAFTAR REKENING BANK
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	BRI Rangkasbitung	BPG 161 PN RKB BT 097577	653240975771000

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

**DAFTAR REKENING BANK
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Banten	2900	097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	BRI Rangkasbitung	BPG 161 PN RKBT 097577	653240975771000

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax: 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG (097577)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653240975771000 | BPG161 PN RKB1 097577
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-01	10:02:06	21716441	Pembayaran belanja barang honorarium pengelola keuangan bulan November tahun 2023 berdasarkan SK No231611301006319000001	0,00	0,00	6.115.450,00	6.115.450,00	SPAN	
2023-12-04	14:21:46	22081881	spr	6.115.450,00	6.115.450,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-06	09:45:21	22348606	Penggantian uang persediaan RM untuk keperluan belanja barang. 231611301006494000001	0,00	0,00	19.816.762,00	19.816.762,00	SPAN	
2023-12-06	09:53:17	22350843	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun Anggaran 2023 231611301006507000001	19.816.762,00	0,00	22.240.000,00	42.056.762,00	SPAN	
2023-12-06	13:45:33	22402366	spr	42.056.762,00	42.056.762,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-07	09:24:57	22530299	Pembayaran belanja barang berupa honorarium pengelola keuangan bulan Desember tahun 2023 berdasarkan231611301006549000001	0,00	0,00	6.115.450,00	6.115.450,00	SPAN	
2023-12-07	11:10:54	22557324	spr	6.115.450,00	6.115.450,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-14	09:03:25	23404569	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n Darsono, S.H. dkk berdasarkan ST Nomor 2551/KP231611301006881000001	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	SPAN	
2023-12-14	11:41:14	23437135	SPPR 14 DES 2023	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2023-12-15	10:19:36	23577316	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n Ahmad Lelendel Basarn, S.H., M.H. dkk berdasarkan231611301006936000001	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	SPAN	
2023-12-18	09:02:41	23975458	Pembayaran Belanja Barang berupa perjalanan dinas a.n Italy Kharul Umamah, S.H., dkk. berdasarkan S231611301006945000001	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00	SPAN	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-18	14:59:11	24041363	653240975771000	2.200.000,00	0,00	4.365.000,00	6.565.000,00	BRIVA	
2023-12-19	14:01:21	24269946	sppr 19 des 2023	6.565.000,00	6.565.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					62.352.662,00	62.352.662,00			
Saldo Akhir							0,00		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Jln. R.A. Kartini No. 55 Telp./Fax. (0252) 201057 Rangkasbitung - Lebak 42314
website: www.pn-rangkasbitung.go.id e-mail: info@pn-rangkasbitung.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK SEMESTER II TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG (097577)

Nomor : 7s /SEK.W29.U3/PL1.2.7/II/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : DARSONO, S.H
NIP : 196607091989031002
Jabatan : Sekretaris (Kuasa Pengguna Barang)
- II. Nama : AGUS MULYADI, S.Sos
NIP : 197908272006041004
Jabatan : Kasubbag. Umum & Keuangan (Pengelola Barang Persediaan)

Menyatakan bahwa telah melakukan **stock opname** barang persediaan periode Semester II Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

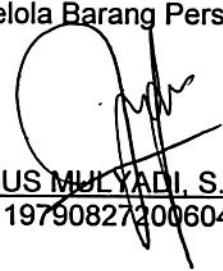
KODE	URAIAN	JML BRG
1	2	3
1010301001-000001	Pulpen Gel Joyko Boxes	6 boxes
1010301001-000003	Pulpen Standar AE7 Fine	6 boxes
1010301002-000001	Tinta Stempel Bantalan	4 pcs
1010301002-000003	Tinta Stempel Otomatis	1 pcs
1010301004-000001	Penghapus/Korektor Tipe-Ex	5 pcs
1010301006-000005	Map Biasa Bufallo	2 pcs
1010301008-000001	Cutter Besar	2 pcs
1010301008-000003	Gunting Besar	2 pcs
1010301008-000007	Isi Cutter Besar	2 pcs
1010301010-000001	Alat Perekat Lakban Hitam Besar	1 pcs
1010301010-000017	Alat Perekat Double Tape Sedang	3 pcs
1010301012-000001	Staples Kecil	4 pcs
1010301012-000002	Staples Besar	2 pcs
1010302001-000001	Kertas HVS A4 80 Gsm	6 rim
1010302001-000002	Kertas HVS F4 80 Gsm	3 rim
1010302002-000001	Kertas Karbon Folio	3 pak
1010302002-000023	Tissue Multi 160 Sheets	5 pcs
1010304004-000010	Tinta Toner Data Print DP-40	3 pcs
1010304004-000011	Tinta/Toner Data Print Dp-41	1 set
1010305001-000001	Sapu Ijuk Lantai	1 pcs
1010305001-000007	Sikat Kamar Mandi Dorong	5 pcs
1010305002-000003	Kanebo Kenmaster	5 pcs
1010305002-000010	Alat Dorongan Air Wiper Lantai	5 pcs
1010305004-000003	Pengki/Serokan Sampah	1 pcs
1010305008-000001	Pembersih Kaca Cling Botol	6 pcs
1010305008-000012	Pembersih Toilet Wipol 750 ml	2 pcs
1010305008-000021	Permbersih Porselen Porstex 1000 ml	5 pcs
1010305008-000022	Soklin Lantai Botol 900 ml	9 pcs
1010305008-000032	Pembersih Porselen Wpc Botol 780 ml	3 pcs
1010305012-000001	Pengharum Stella Semprot 400 ml	1 pcs
1010305012-000005	Pengharum Stella Gantung	13 pcs
1010305012-000010	Kamper Toilet Swallow	3 set

Demikian Berita Acara stock opname ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

 Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Barang

DARSONO, S.H.
NIP. 196607091989031002

Pengelola Barang Persediaan


AGUS MULYADI, S.Sos
NIP. 197908272006041004

**KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No	Uraian	Nilai Sewa (Harga Sewa + Pajak)	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa		Pendapatan Diterima Di Muka
						s.d 31 Desember 2023	Tahun Berjalan	
1.	Sewa gedung dan bangunan untuk Kantin	Rp 4.899.000	36 bulan	01 Maret 2022	25/02/2025	Rp 2.993.833	Rp 1.905.167	Rp 1.905.167
	Jumlah							Rp 1.905.167

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Darsono, S.H.
NIP. 196607091989031002

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
2900	Banten	097577	PN Rangkasbitung	2023	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.660.700	SPM	Kekurangan gaji bulan November s.d Desember 2023
					511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 88	SPM	Kekurangan gaji bulan November s.d Desember 2023
					511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 266.070	SPM	Kekurangan gaji bulan November s.d Desember 2023
					511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 106.428	SPM	Kekurangan gaji bulan November s.d Desember 2023
					511125	Belanja Tunj. Pph PNS	Rp 32.705	SPM	Kekurangan gaji bulan November s.d Desember 2023

Rangkasbitung, 17 Januari 2024

Sekretaris


 Darsono, S.H.

NIP. 196607091989031002

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
 Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
 Wilayah : Banten (29.00)
 Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
2900	Banten	097577	PN Rangkasbitung	2023	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 35.357	Kuitansi	Tagihan Pemakatan Telepon Desember 2023
					522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 43.277	Kuitansi	Tagihan Pemakatan Telepon Desember 2023
					522113	Belanja langganan Air	Rp 50.833	Kuitansi	Tagihan Pemakatan Air Desember 2023
					522113	Belanja langganan Air	Rp 76.333	Kuitansi	Tagihan Pemakatan Air Desember 2023
					521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 604.000	Kuitansi	Tagihan Surat Dinas Desember 2023

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
 Sekretaris




Darsono, S.H.
 NIP. 196607091989031002

**DAFTAR PENERIMAAN HIBAH UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2023**

BA : Mahkamah Agung RI (005)
Eselon I : Badan Urusan Administrasi (01)
Wilayah : Banten (29.00)
Satker : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577)

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
NIHIL							

Rangkasbitung, 17 Januari 2024
Sekretaris


Dairsono, S.H.
NIP. 196607091989031002